

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021



DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI

Jl. MT. Haryono (Jalur Dua) Luwuk
Email : bppkb.banggai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra DP2KB-P3A Kabupaten Banggai disusun untuk memberi arah, tujuan dan sasaran pembangunan pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih efektif dan efisien.

Pembangunan pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk meningkatkan capaian Program dan Kegiatan pelayanan agar lebih baik dan optimal, sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang dengan Keluarga yang sejahtera, mandiri dan berkesetaraan gender. Harapan kami dari Renstra DP2KB-P3A Tahun 2016-2021 dapat memberi manfaat bagi aparat sekaligus kepada masyarakat yang menerima azas manfaat tersebut.

Kami menyadari bahwa Renstra DP2KB-P3A Tahun 2016-2021 yang telah kami susun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mohon maaf serta mengharapkan kritikan dan masukan dari para pembaca Renstra agar menjadi lebih baik, demikian dan atasnya diucapkan terima kasih.

Luwuk, 24 Februari 2020

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641002 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya DP2KBP3A	21
2.3 Kinerja Pelayanan DP2BP3A	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP2KBP3A.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKKBN & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	33
3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis DP2KB-P3A, sebagai implementasi dari kebijakan, program dan kegiatan pokok RPJMD yang telah direview dengan memperhatikan variabel penting visi, misi maupun tugas pokok dan fungsi DP2KB-P3A yang secara yuridis merupakan amanat PERDA tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian Renstra DP2KB-P3A harus didesain dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan visi dan misi Kabupaten Banggai sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021. Berkenaan dengan itu baik formula maupun proses penyusunan Renstra OPD benar-benar mampu mendukung rencana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi RPJMD Kabupaten Banggai, sehingga target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai, DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dibentuk sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai.

Dinas P2KB-P3A Kabupaten Banggai melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menangani 2 urusan pemerintahan yakni : **1. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB, 2. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, didasarkan pada hasil penjabaran Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016-2021. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai, adalah mendukung misi ke-6 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya saing Daerah”.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, telah melalui beberapa langkah penyempurnaan, dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan DP2KB-P3A, BAPPEDA dan Litbang serta masukan dari berbagai elemen yang lain. Dalam implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai mengacu pada dokumen Renstra Perubahan DP2KB-P3A Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) DP2KB-P3A Kabupaten Banggai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan DP2KB-P3A dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat
- b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antar target kinerja dalam RPJMD dengan renstra DP2KB-P3A.
- c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) Tahun mendatang dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis pada DP2KB-P3A Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. sebagai arah kebijakan kinerja yang ingin dicapai DP2KB-P3A dalam kurun waktu 5 tahun.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan DP2KB-P3A.
- c. Memudahkan seluruh jajaran DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun arah kebijakan, program, kegiatan secara terpadu terarah dan terukur dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai periode Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan DP2KB-P3A

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan DP2KB-P3A.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu strategis DP2KB-P3A

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DP2KB-P3A, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 5 tahun mendatang.

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di DP2KB-P3A untuk periode tahun 2016-2021.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DP2KB-P3A yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DP2KB-P3A dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan ulasan singkat dan harapan akan manfaat dari Rencana Strategis DP2KB-P3A Kabupaten Banggai.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DP2KB-P3A

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai.

A. Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah meliputi urusan wajib bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan pelayanan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tugas kepala Dinas meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;

- e. melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebijakan umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentaun yang berlaku;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan uraian tugas sekretaris meliputi :

- a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
- g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil

pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; berdasarkan capaian kinerja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;

2. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana kerja;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang pengendalian penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan NSPK bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan capaian kinerja;
10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai pencapaian/target kinerja;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pemasaran pariwisata meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berdasarkan rencana kerja;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keluarga berencana sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian verifikasi data/dokumen pelayanan rujukan keluarga berencana, operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai ketentuan berlaku;
6. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian verifikasi dokumen penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan penyiapan menyusun dokumen penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran

peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

8. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari infeksi HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berdasarkan capaian kinerja;
10. menyalia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana sesuai pencapaian/target kinerja; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana kerja;

3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan kelompok pemberdayaan keluarga sejahtera, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan kootdinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga berdasarkan capaian kinerja;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan capaian kinerja;
8. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai pencapaian/target kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum serta pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana kerja;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan penyusunan standarisasi, penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan capaian kinerja;
 10. menyalia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
 11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 7. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

1. merencanakan operasional Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;

2. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan rencana kerja;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan capaian kinerja;
9. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi 1 Bagian Sekretariat, 3 Sub Bagian, 5 Bidang, 15 Sub Bidang yaitu :

- a. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Sosial, Politik dan Hukum.
- d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- f. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Seksi Distribusi ALOKON;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

g. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

2.2 Sumber Daya DP2KB-P3A

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas pelayanan di bidang pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku aparatur hendaknya sesuai dengan yang diperlukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keadaan Tenaga / Pegawai :

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keseluruhannya berjumlah : 62 orang

a. Berdasarkan Jabatan / Struktural

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Tenaga Eselon II | : 1 Orang |
| 2) Tenaga Eselon III | : 6 Orang |
| 3) Tenaga Eselon IV | : 18 Orang |
| 4) Tenaga Non Eselon | : 37 Orang |

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- | | |
|-------------------|------------|
| 1) S2 (Strata 2) | : 6 Orang |
| 2) S1 (Strata 1) | : 37 Orang |
| 3) D3 (Diploma 3) | : 2 Orang |
| 4) SMU/SMA | : 17 Orang |

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas P2KB-P3A Kabupaten Banggai terdiri dari 2 urusan, Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
5. Program Keluarga Berencana
6. Program Kesehatan Produksi Remaja
7. Program pelayanan kontrasepsi
8. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
9. Program Keluarga Sejahtera

Ditambah 8 program yang menyangkut belanja DP2KB-P3A yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program Pengembangan Sistem informasi / data
8. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan program tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu periode kedepan dengan sasaran kinerja pelayanan, yakni:

- a. Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- c. Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera yang melaksanakan 8 fungsi keluarga

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.1.1 sebelum perubahan dan 2.1.2 sesudah perubahan.

Selanjutnya untuk melihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1.1 Sebelum Perubahan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1	Rata - rata jumlah anak per keluarga	-	100	-	1.26	0.13	-	-	-	1.26	0.13	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Rasio akseptor KB	-	100	-	81	74	-	-	-	81	74	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Cakupan peserta KB Aktif	-	100	-	81	74	-	-	-	81	74	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	-	100	-	54.77	52.78	-	-	-	54.77	52.78	-	-	-	100	100	-	-	-
II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	-	100	-	1.76	2.36	-	-	-	1.76	2.36	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	100	-	14.54	16.96	-	-	-	14.54	16.96	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Rasio KDRT	-	100	-	0.023	0.021	-	-	-	0.023	0.021	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	100	-	87.90	94.57	-	-	-	87.90	94.57	-	-	-	100	100	-	-	-
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	100	-	65.70	70.68	-	-	-	65.70	70.68	-	-	-	100	100	-	-	-

Tabel 2.1.2 Sesudah Perubahan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan																		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	100	-	-	-	76.95	79.55	81.76	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	-	100	-	-	-	40.55	41.79	42.50	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	-	100	-	-	-	2.75	2.40	2.30	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
4	Nilai akuntabilitas kinerja	-	100	-	-	-	A	A	A	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
5	Persentase peningkatan disiplin ASN	-	100	-	-	-	92	93	94	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP2KB-P3A

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas, yaitu:

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Belum optimalnya kelembagaan P2TP2A dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak
- c. Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi seperti: pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- d. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti: pornografi dan pelecehan seksual
- e. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial belum merata
- f. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
- g. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza)
- h. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
- i. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB
- j. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan
- k. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai

Rencana Strategis Kabupaten Banggai disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode 2016 – 2021 yaitu :

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai
Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman
Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**

Yang bermakna sebagai berikut :

Kabupaten Banggai : *Kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten Banggai yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan ilmiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.*

Pusat Pertumbuhan Ekonomi : *Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah / daerah kabupaten di kawasan timur Pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi dimaksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah dikembangkan ataupun akan dikembangkan.*

Pusat Pertanian : *Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur Pulau Sulawesi sehingga dapat menjadi produsen dan penyuplai tertinggi bahan pangan bukan hanya secara domestik di Provinsi Sulawesi Tengah tetapi juga ke provinsi lainnya.*

Pusat Kemaritiman : *Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi / pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri / jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim / bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.*

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya : *Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus didasarkan atau dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai.*

Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya mencapai visi yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Banggai, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Banggai, termaktub dalam misi keenam yakni “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah”.

Dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banggai melalui tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimungkinkan adanya faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Masyarakat masih enggan melapor adanya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Masih terdapat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak
3. Partisipatif Perempuan dalam kesertaan Pembangunan Masih Kurang
4. Eksistensi kelembagaan PUG masih kurang
5. Penduduk prasejahtera masih cukup tinggi
6. Masih banyak penduduk / pasangan usia subur yang enggan memakai ataupun menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) modern
7. Masih banyak penduduk / PUS bertempat tinggal di daerah tertinggal / terpencil dan perbatasan yang belum terakses dengan program pelayanan KB
8. Kendaraan pelayanan KB mengalami kerusakan berat dan belum mendapat perhatian sering dalam penanganan / perbaikan oleh pemerintah daerah

b. Faktor Pendorong

1. Adanya dukungan pembiayaan oleh pusat
2. Adanya sinergitas pelayanan dengan instansi terkait
3. Adanya dukungan program nasional melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
4. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. Adanya dukungan tenaga potensial lokal / daerah
6. Adanya Operasional bagi tenaga teknis kesehatan, Petugas Lapangan KB serta PPKBD dan Sub PPKBD

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

3.3.1. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini tiap tahun menjadi prioritas karena maju mundurnya suatu daerah atau berhasil tidaknya suatu daerah dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompatibel.

Melihat program yang ditawarkan adalah pengendalian kuantitas penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Cakupannya adalah menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan mewujudkan, keluarga sejahtera dengan penduduk seimbang sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.

Peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat pra sejahtera menjadi sebuah tantangan yang harus mendapat jawaban dan prioritas utama karena keberhasilan suatu OPD dapat dilihat dari capaian kinerja yang menjadi prioritasnya.

Urgensi dari renstra propinsi dan renstra kabupaten pada dasarnya adalah saling terkait, hal ini dikarenakan program dan

kegiatan propinsi sebagian di arahkan untuk kabupaten. Sehingga kerjasama untuk pencapaian kinerja yang maksimal sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program dan kegiatan yang ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah yang ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan kita banyak oleh karena itu kita harus merencanakan ruang untuk mempertemukan kebutuhan dan keterbatasan. Dalam pengembangan wilayah, penataan ruang dapat memberikan intervensi untuk mengarahkan pengembangan wilayah sesuai / mendekati rencana yang diinginkan melalui rencana tata ruang.

Kabupaten Banggai adalah daerah yang saat ini banyak dilirik oleh para investor, karena kekayaan alam yang dimiliki. Sehingga banyak pendatang yang tiap tahun meningkat jumlahnya. Percepatan pembangunan di Kabupaten Banggai meningkatkan lajunya peningkatan populasi tetapi tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten.

Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain adalah, *Pertama*, rencana tata ruang kabupaten tidak disesuaikan dengan keadaan wilayah, social dan ekonomi. *Kedua*, penataan ruang saat ini masih banyak berupa *Planning Paper* ketimbang sebagai *Planning Management*.

Oleh sebab itu diperlukan tindakan nyata dan berkelanjutan untuk menghadapi masalah yang ada. Efektivitas sebagai instrumen pengelolaan menuju pembangunan berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memperkirakan penataan ruang wilayah yang

potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Jumlah kelompok usaha perempuan masih rendah dan tidak aktif
- 2) Angka kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi
- 3) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
- 4) Penguatan kelembagaan penguatamaan gender masih lemah / kurang
- 5) Jumlah penanganan dan pelayanan bagi anak-anak terlantar, putus sekolah dan trafficking masih kurang

b. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Penggunaan alat kontrasepsi / Contraceptive Prevalensi Rate (CPR) masih terbatas
- 2) Unmet Need masih tinggi, hal ini disebabkan kelompok sasaran masih berada di galcitas yang belum tersentuh karena adat istiadat
- 3) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terutama bagi pria masih cukup kurang
- 4) Child Woman Ratio (CWR) masih cukup tinggi
- 5) Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) KS I (Keluarga Miskin) terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi
- 6) Jumlah lembaga relatif kurang
- 7) Kepadatan penduduk relatif tinggi
- 8) Jumlah Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS) masih kurang

Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths* / kekuatan, *Weaknesses* / kelemahan, *Opportunities* / peluang, dan *Threats* / tantangan).

Tabel
Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Eksternal	<u>Peluang (Opportunities)</u>	<u>Tantangan (Threats)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pembiayaan pusat 2. Sinergitas pelayanan dengan instansi terkait (POLRI, TNI, Kesehatan dan PKK, Dinas Sosial dan BPMD) 3. Lembaga / instansi hukum 4. Lembaga / Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 5. Masyarakat yang terlatih (Kader/PPKBD) 6. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 7. Undang-undang Perlindungan Anak 8. Adanya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat 2. Adanya perdagangan orang / trafficking 3. Eksistensi kelembagaan pengarusutamaan gender masih kurang 4. Peran bidan dan petugas lapangan KB belum optimal 5. Komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKB belum optimal 6. Unmet Need masih cukup tinggi 7. Masyarakat prasejahtera masih cukup tinggi
Faktor Internal	<u>Kekuatan (Strenght)</u>	<u>Strategi (S-O)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan alokasi pembiayaan melalui pusat dan daerah 2. Ketersediaan SDM / aparatur dengan pendidikan Strata 1 3. Motivasi kerja aparatur efektif 4. Kerjasama dengan pimpinan dalam organisasi / kantor baik 5. Memiliki standar kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergitas pelayanan dengan instansi terkait 2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur DP2KB-P3A 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan baik KB maupun Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<u>Strategi (S-T)</u>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan dan konseling terhadap masyarakat 2. Membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender 3. Memberikan pelatihan bagi petugas dan kader 4. Melakukan pertemuan teknis /

<p>6. Memiliki moralitas kerja yang baik</p> <p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan baik pusat maupun daerah masih terbatas 2. Petugas lapangan KB di beberapa kecamatan dalam kabupaten masih sangat terbatas 3. Keterbatasan pengetahuan baik program keluarga berencana maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Keterbatasan peralatan pendukung KB 5. Keterbatasan operasional kendaraan pelayanan KB maupun penerangan KB 6. Keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan perencanaan maupun keuangan 	<p><u>Strategi (O-W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah petugas lini lapangan di kecamatan sesuai Undang-undang No. 52 tahun 2010 2. Meningkatkan peran PPKBD dan kader BKB 3. Memberikan pembinaan teknis bagi kader maupun PPKBD 4. Memberikan jasa / honor bagi kader dan PPKBD 5. Memberikan pelayanan KB maupun memberdayakan perempuan dan perlindungan anak secara optimal 	<p>program KB dan pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p><u>Strategi (W-T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi ataupun membatasi ketidakadilan atas ekonomi bagi perempuan 2. Mendorong masyarakat / PUS mengenal pemanfaatan alat kontrasepsi (Alkon) baik yang sederhana maupun modern
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah .

a. Tujuan

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai mengharapkan segala permasalahan yang dihadapi dapat segera terpecahkan dan teratasi dengan baik sehingga pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana benar-benar dapat tercapai sesuai dengan rencana artinya pembangunan tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Banggai.

Adapun harapan / tujuan yang hendak dicapai dalam periode 5 tahun kedepan yakni :

1. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak.

b. Sasaran

Tujuan DP2KB-P3A Kabupaten Banggai tentunya mempunyai sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak.

Dalam perwujudan visi Bupati Banggai yakni “Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”, dan Misi yang terkait dengan tugas pokok DP2KB-P3A Kabupaten Banggai adalah misi ke-6 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya saing Daerah”. Tujuan dan sasaran perangkat Daerah harus sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021. Tujuan RPJMD DP2KBP3A ialah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Sasaran RPJMD ialah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan kemuadian tertuang dalam Renstra DP2KBP3A Kabupaten Banggai yakni Meningkatkan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dengan sasaran Meningkatnya pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, dirumuskan arah kebijakan dan strategi DP2KB-P3A sebagai berikut:

A. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan
Strategi yang ditempuh yaitu meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender.

B. Peningkatan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Strategi yang ditempuh yaitu menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
Strategi yang ditempuh yaitu menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak serta melakukan kerjasama lintas sektor dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kecamatan layak anak.

D. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
Strategi yang ditempuh yaitu meningkatkan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko *drop out* dan penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB.

E. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja

Strategi yang ditempuh yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

F. Peningkatan keluarga sejahtera

Strategi yang ditempuh yaitu pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.

Adapun Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra DP2KB-P3A yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A terdiri dari 2 urusan yaitu pertama Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kedua Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sejalan dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021 program yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A dengan dua urusan pemerintahan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
5. Program Keluarga Berencana
6. Program Kesehatan Produksi Remaja
7. Program pelayanan kontrasepsi
8. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
9. Program Keluarga Sejahtera

Rencana capaian program dan kegiatan DP2KB-P3A Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada 6.1 sebelum perubahan dan tabel 6.2 sesudah perubahan yakni:



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur dengan standar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 , hal ini dapat dilihat pada tabel 7.1.



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Untuk melihat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Tabel 2.1.1 Sebelum Perubahan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai


No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	Rata - rata jumlah anak per keluarga	-	100	-	1.26	0.13	-	-	-	1.26	0.13	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Rasio akseptor KB	-	100	-	81	74	-	-	-	81	74	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Cakupan peserta KB Aktif	-	100	-	81	74	-	-	-	81	74	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	-	100	-	54.77	52.78	-	-	-	54.77	52.78	-	-	-	100	100	-	-	-
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	-	100	-	1.76	2.36	-	-	-	1.76	2.36	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	100	-	14.54	16.96	-	-	-	14.54	16.96	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Rasio KDRT	-	100	-	0.023	0.021	-	-	-	0.023	0.021	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	100	-	87.90	94.57	-	-	-	87.90	94.57	-	-	-	100	100	-	-	-
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	100	-	65.70	70.68	-	-	-	65.70	70.68	-	-	-	100	100	-	-	-

Kepala Dinas

Dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 2.1.2 Sesudah Perubahan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak																		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	100	-	-	-	76.95	79.55	81.76	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	-	100	-	-	-	40.55	41.79	42.50	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	-	100	-	-	-	2.75	2.40	2.30	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
4	Nilai akuntabilitas kinerja	-	A	-	-	-	A	A	A	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
5	Persentase peningkatan disiplin ASN	-	100	-	-	-	92	93	94	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0

Kepala Dinas

Dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	991,837,987	729,367,872	976,155,116	1,934,500,000	2,379,500,000	988,704,942	720,220,065	-	-	-	100	99	-	-	-	0.26	0.26
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,200,000	2,640,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000	4,200,000	2,640,000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.37	0.37
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,200,000	68,900,000	71,500,000	76,500,000	77,500,000	60,878,057	72,484,293	-	-	-	98	100	-	-	-	0.11	0.11
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	40,000,000	70,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,000,000	35,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	24,200,000	35,000,000	-	-	-	93	100	-	-	-	0.35	0.35
5	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	24,999,900	15,000,000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.40	0.40
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	10,000,000	6,500,000	17,000,000	20,000,000	22,000,000	10,000,000	4,999,800	-	-	-	100	77	-	-	-	0.35	0.35
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	15,000,000	7,210,500	-	-	-	100	72	-	-	-	0.33	0.33
8	Penyediaan makanan dan minuman	22,464,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	22,453,000	19,977,000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.11	0.11
9	Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	225,415,187	134,708,472	228,655,116	800,000,000	950,000,000	225,415,185	134,708,472	-	-	-	100	100	-	-	-	0.40	0.40
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	110,420,000	76,000,000	125,000,000	350,000,000	600,000,000	110,420,000	84,450,000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.31	0.31
11	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	491,138,800	360,619,400	400,000,000	500,000,000	510,000,000	491,138,800	343,750,000	-	-	-	100	95	-	-	-	0.27	0.27
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	313,689,663	85,063,600	2,249,100,000	813,000,000	1,778,196,108	231,124,914	82,526,800	-	-	-	74	97	-	-	-	0.73	0.73
1	Pembangunan gedung kantor	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	35,200,000	-	-	150,000,000	200,000,000	33,000,000	-	-	-	-	94	-	-	-	-	1.00	1.00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	66,875,000	17,954,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000	66,875,000	17,954,000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.73	0.73
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	88,364,663	22,269,600	50,000,000	150,000,000	200,000,000	88,364,663	20,953,000	-	-	-	100	94	-	-	-	0.75	0.75
5	Pengadaan bangunan / sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor	79,890,000	-	200,000,000	300,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
6	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	36,000,000	42,000,000	44,000,000	50,000,000	55,000,000	35,925,251	41,999,800	-	-	-	100	100	-	-	-	0.17	0.17
7	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	3,360,000	840,000	2,100,000	8,000,000	15,000,000	3,360,000	420,000	-	-	-	100	50	-	-	-	0.75	0.75
8	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan	4,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	10,000,000	3,600,000	1,200,000	-	-	-	90	60	-	-	-	0.50	0.50
9	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	-	-	350,000,000	-	498,196,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29,410,000	65,500,000	150,000,000	100,000,000	105,000,000	29,370,000	57,050,000	-	-	-	100	87	-	-	-	1.23	1.23
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5,410,000	-	-	-	-	5,410,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	1.00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24,000,000	65,500,000	150,000,000	100,000,000	105,000,000	23,960,000	57,050,000	-	-	-	100	87	-	-	-	1.73	1.73
IV	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	-	15,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	-	14,425,600	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-
1	Pemulangan pegawai yang pensiun	-	15,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	-	14,425,600	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58,300,300	24,531,025	150,000,000	172,000,000	190,000,000	55,673,800	24,524,725	-	-	-	95	100	-	-	-	0.58	0.58
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	19,400,000	-	120,000,000	122,000,000	130,000,000	19,400,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	1.00
2	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	24,492,500	24,531,025	30,000,000	50,000,000	60,000,000	24,185,000	24,524,725	-	-	-	99	100	-	-	-	0.00	0.00

3	Pertemuan dan Pembinaan Kepegawaian	14,407,800	-	-	-	-	12,088,800	-	-	-	-	84	-	-	-	-	1.00	1.00
VI	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	170,122,480	41,394,425	70,000,000	70,000,000	90,000,000	169,259,800	39,394,150	-	-	-	99	95	-	-	-	0.76	0.76
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29,589,000	8,559,900	15,000,000	15,000,000	20,000,000	29,561,200	8,510,800	-	-	-	100	99	-	-	-	0.71	0.71
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	31,850,000	5,934,525	20,000,000	25,000,000	30,000,000	31,829,900	5,922,925	-	-	-	100	100	-	-	-	0.81	0.81
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	108,683,480	26,900,000	35,000,000	30,000,000	40,000,000	107,868,700	24,960,425	-	-	-	99	93	-	-	-	0.75	0.75
VII	Program pengembangan sistem informasi / data	-	-	55,000,000	60,000,000	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan profil perangkat daerah	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemutakhiran data kepegawaian	-	-	35,000,000	40,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	77,545,917	97,918,498	250,000,000	152,000,000	155,000,000	77,572,155	97,586,050	-	-	-	100	100	-	-	-	0.26	0.26
1	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	77,545,917	97,918,498	250,000,000	152,000,000	155,000,000	77,572,155	97,586,050	-	-	-	100	100	-	-	-	0.26	0.26
IX	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	226,388,200	93,846,747	103,954,000	220,000,000	350,000,000	221,579,100	92,320,575	-	-	-	98	98	-	-	-	0.59	0.59
1	Fasilitasi pengembangan P2TP2	59,163,200	-	-	-	-	59,063,200	39,962,000	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	1.00
2	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	78,295,000	-	-	-	-	76,714,800	9,968,375	-	-	-	98	-	-	-	-	1.00	1.00
3	Fasilitasi Pembentukan PUG dan PP	-	93,846,747	103,954,000	220,000,000	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembentukan P2TP2A	59,400,000	-	-	-	-	57,771,100	23,374,200	-	-	-	97	-	-	-	-	1.00	1.00
5	Sosialisasi pengarusutamaan gender	29,530,000	-	-	-	-	28,030,000	19,016,000	-	-	-	95	-	-	-	-	1.00	1.00
X	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	189,852,530	100,258,063	213,823,036	450,000,000	667,373,956	188,882,405	102,235,228	-	-	-	99	100	-	-	-	0.47	0.47
1	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	52,040,900	-	-	-	-	51,072,025	-	-	-	-	98	-	-	-	-	1.00	1.00
2	Pembinaan Pokja dalam Pelaksanaan P2WKSS	-	80,037,063	62,449,080	200,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	P2WKSS	137,811,630	-	-	-	-	137,810,380	102,235,228	-	-	-	100	100	-	-	-	1.00	1.00
4	Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan	-	20,221,000	151,373,956	250,000,000	367,373,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	Program keserasian kebijakan peningkatan kulaitas anak dan perempuan	204,614,587	82,568,598	400,000,000	441,000,000	712,000,000	176,914,600	61,541,650	-	-	-	86	75	-	-	-	0.60	0.60
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	-	37,548,468	150,000,000	221,000,000	366,000,000	-	20,045,450	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi UU perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak	29,813,600	-	-	-	-	26,689,900	-	-	-	-	90	-	-	-	-	1.00	1.00
3	Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Kota Layak Anak dan Forum Anak Daerah	45,690,000	45,020,130	250,000,000	220,000,000	346,000,000	45,489,900	26,544,700	-	-	-	100	59	-	-	-	0.01	0.01
4	Peringatan hari anak nasional	50,898,187	-	-	-	-	26,689,900	-	-	-	-	52	-	-	-	-	1.00	1.00
5	Pendataan dan penyusunan data serta analisis permasalahan anak terlantar, putus sekolah dan anak jalanan	51,112,300	-	-	-	-	51,074,500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	1.00
6	Orientasi PKSD bagi kader dan TP PKK	27,100,500	-	-	-	-	26,970,400	14,951,500	-	-	-	100	-	-	-	-	1.00	1.00
XII	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	30,025,000	16,540,228	158,305,840	200,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.45
1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	30,025,000	16,540,228	158,305,840	200,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.45
XIII	Program Keluarga Berencana	2,647,017,000	7,670,644,810	4,861,000,000	5,873,861,652	5,868,825,747	2,512,497,650	5,512,210,474	-	-	-	95	72	-	-	-	1.90	1.90

1	Pelayanan KIE	49,898,000	142,847,571	35,000,000	200,000,000	570,000,000	49,586,000	21,286,000	-	-	-	99	15	-	-	-	-	1.86	-	1.86
2	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alokasi	50,000,000	27,007,239	50,000,000	50,000,000	150,000,000	49,996,700	7,891,249	-	-	-	100	29	-	-	-	-	0.46	-	0.46
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS	1,338,671,000	7,500,790,000	4,776,000,000	5,623,861,652	5,148,825,747	1,338,358,150	5,438,871,225	-	-	-	100	73	-	-	-	-	4.60	-	4.60
4	Pertemuan tenaga teknis KB dan PLKB	26,389,000	-	-	-	-	26,380,200	18,883,200	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
5	Sistem informasi database KB	30,000,000	-	-	-	-	28,247,200	21,988,800	-	-	-	94	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
6	TNI Manunggal KB Kes	46,319,000	-	-	-	-	46,319,000	3,290,000	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
7	Bantuan Operasional KB	1,105,740,000	-	-	-	-	973,610,400	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
XIV	Program kesehatan reproduksi remaja	76,184,500	42,562,739	30,000,000	150,000,000	220,000,000	75,248,400	27,404,500	-	-	-	99	64	-	-	-	-	0.44	-	0.44
1	Pembinaan PIK-KRR	25,000,000	42,562,739	30,000,000	150,000,000	220,000,000	24,398,000	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	0.70	-	0.70
2	Pertemuan tenaga pengelola PIK KRR	18,459,500	-	-	-	-	18,420,700	27,404,500	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
3	Lomba PIK Remaja	32,725,000	-	-	-	-	32,429,700	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
XV	Program pelayanan kontrasepsi	96,000,000	119,681,193	150,000,000	335,000,000	500,000,000	94,795,000	119,681,193	-	-	-	99	100	-	-	-	-	0.25	-	0.25
1	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	96,000,000	119,681,193	150,000,000	335,000,000	500,000,000	94,795,000	119,681,193	-	-	-	99	100	-	-	-	-	0.25	-	0.25
XVI	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan KB/KR yang mandiri	229,842,000	134,527,178	311,393,200	523,412,423	750,000,000	228,638,945	67,223,589	-	-	-	99	50	-	-	-	-	0.41	-	0.41
1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	100,000,000	37,076,126	150,000,000	323,412,423	450,000,000	98,799,945	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	0.63	-	0.63
2	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	-	30,187,463	161,393,200	200,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Roadshow PKK KB Kes	41,024,000	37,076,126	-	-	-	41,021,900	37,037,126	-	-	-	100	100	-	-	-	-	0.10	-	0.10
4	Kesatuan gerak PKK KB Kes	38,264,000	-	-	-	-	38,264,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
5	Bulan bhakti bhayangkara KB Kes	50,554,000	30,187,463	-	-	-	50,553,100	30,186,463	-	-	-	100	100	-	-	-	-	0.40	-	0.40
XVII	Program keluarga sejahtera	300,559,680	166,502,512	470,610,648	659,612,793	1,300,000,000	240,727,992	162,430,969	-	-	-	80	98	-	-	-	-	0.45	-	0.45
1	Pelaksanaan Harganias	60,768,324	45,444,900	50,000,000	200,000,000	300,000,000	60,768,324	45,370,224	-	-	-	100	100	-	-	-	-	0.25	-	0.25
2	Pembinaan Kelompok UPPKS	18,542,207	25,423,830	30,610,648	89,612,793	250,000,000	18,524,570	25,397,400	-	-	-	100	100	-	-	-	-	0.37	-	0.37
3	Bimtek dan Pemilihan Kader/Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	61,370,896	31,125,782	30,000,000	90,000,000	250,000,000	60,335,098	30,567,000	-	-	-	98	98	-	-	-	-	0.49	-	0.49
4	Pelatihan/Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP	58,778,253	64,508,000	50,000,000	170,000,000	300,000,000	-	61,096,345	-	-	-	-	95	-	-	-	-	0.10	-	0.10
5	Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	101,100,000	-	-	-	-	101,100,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
6	Penyajian Data dan Informasi Keluarga	-	-	310,000,000	110,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Dinas

dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA
KABUPATEN BANGGAI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak perempuan dan anak	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91	91.5	92	92.5	93
2	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.25	1.82	1.49	1.45	1.40
			Jumlah Rata-rata Anak yang dimiliki oleh WUS selama masa reproduksi	3.02	2.80	2.75	2.40	2.30

Kepala Dinas

Dr. T WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA
KABUPATEN BANGGAI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Persentase Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.06	74.50	76.95	79.55	81.76
				Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	38.20	39.30	40.55	41.79	42.50
				Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	3.02	2.80	2.75	2.40	2.30
2	Meningkatkan tata kelola Dinas P2KBP3A yang baik, bersih dan akuntabel	Persentase tata kelola DP2KBP3A	Meningkatnya tata kelola Dinas P2KBP3A yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	C	B	A	A	A
				Persentase peningkatan disiplin ASN	85	90	92	93	94

Kepala Dinas


dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NTP: 10641003 100002 1 006

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya			
MISI 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang beribawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola DP2KBP3A yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola DP2KBP3A yang baik, bersih dan akuntabel	1 Peningkatan Kualitas Kinerja dan tata kelola	1 Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, parsipatif dan berbasis goverment
		2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP2KBP3A	1 Peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
		3 Meningkatkan kinerja/ kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah	1 Penyediaan data yang valid dan reliable untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
		3 Peningkatan kompetensi profesionalitas, dan disiplin ASN serta budaya kerja	1 Penegakan disiplin ASN melalui penerapan reward dan punishment
MISI 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1 Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	1 Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan
		2 Memperkuat sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 Peningkatan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
		3 Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak serta melakukan kerjasama lintas sektor dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui kelembagaan kabupaten/ kecamatan layak anak	3 Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup

		4 Meningkatkan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out dan penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB	4 Peningkatan pelayanan keluarga berencana
		5 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja	5 Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
		6 Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB	6 Peningkatan keluarga sejahtera

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/AUTONOME	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD	Kab. Banggai	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
		01	Penulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0	0	-	3 Orang	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	58,300,300	100%	24,531,025	0	0	0	0	0	0	0		
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	3 kali	3 kali	19,400,000	0		0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				Biaya kepesertaan / kontribusi	3 kali	3 kali		0		0	0	0	0	0	0	0		
		04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	6 Dok	1 Dok	24,492,500	1 Dok	24,531,025	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		42	Pertemuan dan Pembinaan Kepegawaian	Jumlah peserta pertemuan dan pembinaan kepegawaian	0	50 Org	14,407,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	170,122,480	100%	41,394,425	0	0	0	0	0	0	0		
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	29,589,000	1 Dok	8,559,900	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				Jumlah dokumen TEPPA	12 Dok	12 Dok		12 Dok		0	0	0	0	0	0	0		
		04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	16 Lap	16 Lap	31,850,000	16 Lap	5,934,525	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA, RENJA)	6 Dok	5 Dok	108,683,480	5 Dok	26,900,000	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		07	Program pengembangan sistem informasi / data	persentase pemanfaatan sistem informasi / data	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		
		03	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Profil SKPD	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		39	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	persentase capaian pelaksanaan kegiatan	100%	100%	77,545,917	100%	97,918,498	0	0	0	0	0	0	0		
		02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	10 Lap	1 Lap	77,545,917	5 Dok	97,918,498	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KELOMPOK	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KELOMPOK	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja PD	Kab.			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
			08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan	24 Org	60 Org	30,025,000	24 Org	16,540,228	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai		
			18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase usaha kelompok perempuan yang aktif	100%	100%	189,852,530	100%	100,258,063	0	0	0	0	0	0	0				
			05	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Jumlah hasil karya yang dipamerkan	4 jenis	4 jenis	52,040,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai		
			07	Pembinaan Pokja dalam Pelaksanaan PPRG	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	10 Klmpk	0	0	12 Klmpk	80,037,063	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai		
			07	P2WKSS	Jumlah peserta p2wkss	100 Org	100 Org	137,811,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab.		
			08	Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	50 Klmpk	0	0	10 Klmpk	20,221,000	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai		
2. Meningkatkan Pengendalian Penduduk yang tumbuh dan seimbang	Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				Persentase penduduk yang tumbuh seimbang	2.8	2.8	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1. Persentase Pengendalian Angka Kelahiran (LPP)	2.75	2.75	3,349,603,180	2.50	8,133,918,432	0	0	0	0	0	0	0	0			
				15	Program Keluarga Berencana	Persentase pelayanan keluarga berencana	100%	100%	2,647,017,000	100%	7,670,644,810	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02	Pelayanan KIE	Jumlah kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak dan Media Penyiaran Radio	23 Kec	8 Kec	49,898,000	10 Kec	142,847,571	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
						2. Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS	3.03	3.02	2.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				07	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alokasi	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	224 faskes	224 faskes	50,000,000	224 faskes	27,007,239	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				08	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	20 Jenis	12 Jenis	1,338,671,000	11 Jenis	7,500,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				27	Pertemuan tenaga teknis KB dan PLKB	Jumlah tenaga teknis KB dan PLKB	0	80 Org	26,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				31	Sistem informasi database KB	Jumlah dokumen data base KB	1 Dok	1 Dok	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
				32	TNI Manunggal KB Kes	Jumlah kegiatan TNI manunggal KB Kes	0	1 Keg	46,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		33	Bantuan Operasional KB	jumlah balai yang memperoleh dana bokb	0	21 bp	1,105,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai		

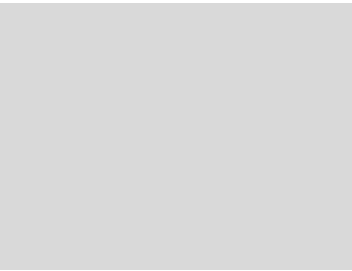
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/OUTCOME	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja PD	Kab. Banggai	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
		16	Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase kelompok PIK KRR yang aktif	100%	100%	76,184,500	100%	42,562,739	0	0	0	0	0	0	0	0		
		03	Pembinaan PIK-KRR	Jumlah Pengurus Kelompok PIK - KRR yang mendapatkan Pembinaan	100 Org	115 Org	25,000,000	125 Org	42,562,739	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		03	Pertemuan tenaga pengelola PIK KRR	Jumlah sekolah	20 sek	15 Sek	18,459,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		05	Lomba PIK Remaja	Jumlah peserta lomba	15 Sek	15 Sek	32,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		17	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB baru	100%	100%	96,000,000	100%	119,681,193	0	0	0	0	0	0	0	0		
		05	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Jumlah kecamatan yang menerima pelayanan	23 Kec	23 Kec	96,000,000	23 Kec	119,681,193	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan KB/KR yang mandiri	Cakupan peserta KB baru dan aktif	100%	100%	229,842,000	100%	134,527,178	0	0	0	0	0	0	0	0		
		01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah desa	337 desa	337 desa	100,000,000	337 desa	37,076,126	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		02	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Jumlah Masyarakat yang dilayani menjadi Akseptor KB pada kegiatan Roadshow	550 Org	0	0	300 Org	30,187,463	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		02	Roadshow PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan roadshow	1 keg	1 Keg	41,024,000	1 Keg	37,076,126	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		03	Kesatuan gerak PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan kesatuan gerak pkk kb kes	0	1 Keg	38,264,000			0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		04	Bulan bhakti bhayangkara KB Kes	Jumlah pelaksanaan bulan bhakti bhayangkara	1 Keg	1 Keg	50,554,000	1 Keg	30,187,463	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		25	Program keluarga sejahtera	Persentase peningkatan tahapan keluarga sejahtera	100%	100%	300,559,680	100%	166,502,512	0	0	0	0	0	0	0	0		
		01	Pelaksanaan Harganas	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kader, Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	5 Klmpk	5 Klmpk	60,768,324	5 Klmpk	45,444,900	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		02	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	2 Kali	4 Kali	18,542,207	4 Kali	25,423,830	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai

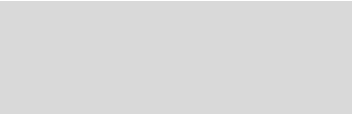
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KELOMPOK SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/OUTCOME	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD	Kab.		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
			03	Bimtek dan Pemilihan Kader/Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	2 Kali	2 Kali	61,370,896	2 Kali	31,125,782	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
			04	Pelatihan/Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	100 Org	100 Org	58,778,253	50 Org	64,508,000	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
			04	Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah kader	337 Org	337 kader PPKBD	101,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
			05	Penyajian Data dan Informasi Keluarga	Jumlah profil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
Total								5,641,389,844		9,485,907,488	0	0	0	0	0	0	0		

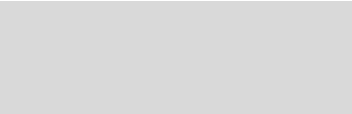
Kepala Dinas



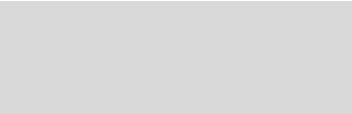
Dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006



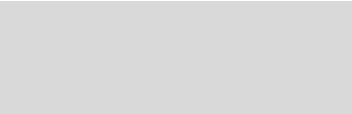












**TABEL 6.2 SESUDAH PERUBAHAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA
KABUPATEN BANGGAI**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1 Meningkatkan tata kelola Dinas P2KB-P3A yang baik, bersih dan akuntabel				Persentase tata kelola DP2KBP3A	0	0		0		90		95		100		100					
	Meningkatnya tata kelola Dinas P2KB-P3A yang baik, bersih dan akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja	0	0		0		A		A		A		A					
		02	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	0	0	0	0	0	100%	976,155,116	100%	1,934,500,000	100%	2,379,500,000	100%	2,379,500,000		
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	0	0	0	0	0	700 lbr	4,000,000	700 lbr	8,000,000	700 lbr	10,000,000	700 lbr	10,000,000		Kab. Banggai
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	0	0	0	0	0	6 Rek	71,500,000	6 Rek	76,500,000	6 Rek	77,500,000	6 Rek	77,500,000		Kab. Banggai
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	0	0	0	0	0	5 Unit	40,000,000	5 Unit	70,000,000	5 Unit	80,000,000	5 Unit	80,000,000		Kab. Banggai
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan, jumlah jenis bahan kebersihan kantor	0	0	0	0	0	2 Org, 10 Jns, 7 Jns	35,000,000	2 Org, 10 Jns, 7 Jns	40,000,000	2 Org, 10 Jns, 7 Jns	45,000,000	2 Org, 10 Jns, 7 Jns	45,000,000		Kab. Banggai
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dipergunakan	0	0	0	0	0	10 Jenis	20,000,000	10 Jenis	25,000,000	10 Jenis	30,000,000	10 Jenis	30,000,000		Kab. Banggai
				11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	0	0	0	0	0	4 Jns, 42.500 lbr	17,000,000	4 Jns, 50.000 lbr	20,000,000	4 Jns, 55.000 lbr	22,000,000	4 Jns, 55.000 lbr	22,000,000		Kab. Banggai
				12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan instalasi yang digunakan	0	0	0	0	0	11 Kmpnn, 6 BP	15,000,000	11 Kmpnn, 8 BP	20,000,000	11 Kmpnn, 10 BP	25,000,000	11 Kmpnn, 10 BP	25,000,000		Kab. Banggai
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	0	0	0	0	0	844 dos	20,000,000	987 dos	25,000,000	1100 dos	30,000,000	1100 dos	30,000,000		Kab. Banggai
				18	Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kinsultasi luar daerah yang dhadiri	0	0	0	0	0	50 kali	228,655,116	55 kali	800,000,000	60 kali	950,000,000	60 kali	950,000,000		Kab. Banggai


				INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD				
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD						
		19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dhadiri	0	0	0	0	0	0	30 kali	125,000,000	35 kali	350,000,000	40 kali	600,000,000	40 kali	600,000,000		Kab. Banggai	
		20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	0	0	0	0	0	0	20 Orang	400,000,000	20 Orang	500,000,000	20 Orang	510,000,000	20 Orang	510,000,000		Kab. Banggai	
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	0	0	0	0	0	100%	2,249,100,000	100%	813,000,000	100%	1,778,196,108	100%	1,778,196,108				
		03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gudang dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun	0	0	0	0	0	1 Unit	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-		Kab. Banggai	
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	10 Unit	150,000,000	15 Unit	200,000,000	15 Unit	200,000,000	15 Unit	200,000,000		Kab. Banggai
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	0	0	0	0	10 Unit	100,000,000	10 Unit	150,000,000	10 Unit	200,000,000	10 Unit	200,000,000	10 Unit	200,000,000		Kab. Banggai
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	0	0	0	0	0	10 Unit	50,000,000	10 Unit	150,000,000	10 Unit	200,000,000	10 Unit	200,000,000	10 Unit	200,000,000		Kab. Banggai
		11	Pengadaan bangunan / sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor	Jumlah pagar balai penyuluhan yang dibangun	0	0	0	0	0	2 Unit	200,000,000	3 Unit	300,000,000	4 Unit	600,000,000	4 Unit	600,000,000	4 Unit	600,000,000		Kab. Banggai
		24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	0	0	0	0	0	3 Unit	44,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	55,000,000	3 Unit	55,000,000	3 Unit	55,000,000		Kab. Banggai
		26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	0	0	0	0	5 Unit	2,100,000	8 Unit	8,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000		Kab. Banggai
		28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	0	0	0	0	6 Unit	3,000,000	10 Unit	5,000,000	16 Unit	10,000,000	16 Unit	10,000,000	16 Unit	10,000,000		Kab. Banggai
		42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	0	0	0	0	1 Unit	350,000,000	-	-	1 Unit	498,196,108	1 Unit	498,196,108	1 Unit	498,196,108		Kab. Banggai
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kepatuhan disiplin ASN	0	0	0	0	0	100%	150,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
		01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		05	Pengadaan pakaian khusus	Pakaian olahraga	0	0	0	0	0	95 Psg	150,000,000	95 Psg	100,000,000	95 Psg	150,000,000	95 Psg	150,000,000	95 Psg	150,000,000		Kab. Banggai
				Pakaian batik	0	0	0	0	0	0		70 Pcs		70 Pcs		70 Pcs		70 Pcs			
				Pakaian dinas harian	0	0	0	0	0	80 Pcs		0		0		0		0			
		06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	0	0	0	0	0	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000		

				INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja PD				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD					
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	0	0	0	0	0	0	1 Dok	15,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000		Kab. Banggai
			04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	0	0	0	0	0	0	1 lap	20,000,000	1 lap	25,000,000	1 lap	30,000,000	1 lap	30,000,000		Kab. Banggai
			05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA	0	0	0	0	0	0	5 Dok	35,000,000	5 Dok	30,000,000	5 Dok	40,000,000	5 Dok	40,000,000		Kab. Banggai
			07	Program pengembangan sistem informasi / data	Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000		
			03	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah buku profil	0	0	0	0	0	0	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000		Kab. Banggai
			39	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	0	0	0	0	0	0	1 Dok	35,000,000	1 Dok	40,000,000	1 Dok	45,000,000	1 Dok	45,000,000		Kab. Banggai
			08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian	persentase capaian pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	0	0	100%	250,000,000	100%	152,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000		
			02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	4 Dok	250,000,000	4 Dok	152,000,000	4 Dok	155,000,000	4 Dok	155,000,000		Kab. Banggai
					Persentase peningkatan disiplin ASN	0	0	0	0	0	0	92		93		94		94			
			04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	0	0	0	0	0	0	100%	5,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000		
			01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentasi usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	1 Orang	5,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000		Kab. Banggai
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	0	0	0	0	0	0	100%	150,000,000	100%	172,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000		
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah diklat yang diikuti	0	0	0	0	0	0	6 Kali	120,000,000	6 Kali	122,000,000	6 Kali	130,000,000	6 Kali	130,000,000		Kab. Banggai
			04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP	0	0	0	0	0	0	1 Dok	30,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	60,000,000	1 Dok	60,000,000		Kab. Banggai
			42	Pertemuan dan Pembinaan Kepegawaian	Jumlah peserta pertemuan dan pembinaan kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai

				INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja PD		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
		07	Pembinaan Pokja dalam Pelaksanaan PPRG	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	0	0	0	0	0	14 Kel	62,449,080	14 Kel	200,000,000	14 Kel	300,000,000	14 Kel	300,000,000		Kab. Banggai
		07	P2WKSS	Jumlah peserta p2wkss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		08	Fasilitasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	0	0	0	0	0	15 Kel	151,373,956	15 Kel	250,000,000	15 Kel	367,373,956	15 Kel	367,373,956		Kab. Banggai
				Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	0	0	0	0	0	40.55		41.79		42.50		42.50			
		15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan	0	0	0	0	0	100%	400,000,000	100%	441,000,000	100%	712,000,000	100%	712,000,000		
		05	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	0	0	0	0	0	200 Org	150,000,000	200 Org	221,000,000	200 Org	366,000,000	200 Org	366,000,000		Kab. Banggai
		05	Sosialisasi UU perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		06	Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Kota Layak Anak dan Forum Anak Daerah	Jumlah Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak yang dibentuk dan dibina	0	0	0	0	0	2 Forum	250,000,000	2 Forum	220,000,000	2 Forum	346,000,000	2 Forum	346,000,000		Kab. Banggai
		06	Peringatan hari anak nasional	Jumlah peserta hari anak nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		07	Pendataan dan penyusunan data serta analisis permasalahan anak terlantar, putus sekolah dan anak jalanan	Jumlah dokumen pendataan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		09	Orientasi PKSD bagi kader dan TP PKK	Jumlah kader dan TP PKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kab. Banggai
		17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	0	0	0	0	0	100%	158,305,840	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000		
		08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan	0	0	0	0	0	24 Org	158,305,840	24 Org	200,000,000	24 Org	250,000,000	24 Org	250,000,000		Kab. Banggai

				INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,	DATA CAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja PD		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
			04	Bulan bhakti bhayangkara KB Kes	Jumlah pelaksanaan bulan bhakti bhayangkara	0	0	0	0	0								Kab. Banggai	
			25	Program keluarga sejahtera	Persentase peningkatan tahapan keluarga Pra	0	0	0	0	0	100%	470,610,648	100%	659,612,793	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	
			01	Pelaksanaan Harganas	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	0	0	0	0	0	5 Kel	50,000,000	5 Kel	200,000,000	5 Kel	300,000,000	5 Kel	300,000,000	Kab. Banggai
			02	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	0	0	0	0	0	4 Kali	30,610,648	4 Kali	89,612,793	4 Kali	250,000,000	4 Kali	250,000,000	Kab. Banggai
			03	Bimtek dan Pemilihan Kader/Kelompok Tribina (PKB, BKB, BKR)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan	0	0	0	0	0	3 Kali	30,000,000	3 Kali	90,000,000	3 Kali	250,000,000	3 Kali	250,000,000	Kab. Banggai
			04	Pelatihan/Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan IMP	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	0	0	0	0	0	100 Org	50,000,000	100 Org	170,000,000	100 Org	300,000,000	100 Org	300,000,000	Kab. Banggai
			04	Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah kader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Banggai
			05	Penyajian Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Profil KKBPk yang dibuat	0	0	0	0	0	1 Profil	310,000,000	1 Profil	110,000,000	1 Profil	200,000,000	1 Profil	200,000,000	Kab. Banggai
Total						0	0	0	0	0	10,604,341,840	12,169,386,868	15,440,895,811	15,440,895,811					

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 7.1 Sebelum Perubahan
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pengendalian angka kelahiran (Laju Pertumbuhan Penduduk)	2.53	2.25	1.82	0	0	0	0
2	Jumlah Rata-rata Anak yang dimiliki oleh WUS (TFR)	3.03	3.02	2.80	0	0	0	0
3	Indeks Pembangunan Gender	90.5	91	91.5	0	0	0	0

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 7.2 Sesudah Perubahan
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	0	0	0	76.95	79.55	81.76	81.76
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	0	0	0	40.55	41.79	42.50	42.50
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	0	0	0	2.75	2.40	2.30	2.30
4	Nilai akuntabilitas kinerja	0	0	0	A	A	A	A
5	Persentase peningkatan disiplin ASN	0	0	0	92	93	94	94

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

